

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Pertanian Indonesia saat ini masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat dalam hal kesejahteraan masyarakat petani dan kontribusinya terhadap pendapatan Nasional karena terjadinya penurunan kemampuan lahan yang cepat sehingga menyebabkan persaingan global yang menyebabkan para petani terpuruk dengan adanya wabah virus yang melanda dunia, sehingga menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi perkotaan dan sektor industri. Karena melihat kondisi tersebut perlu adanya strategi alternatif untuk pengembangan arah pertanian baru untuk menjawab tantangan yang perlu di pertimbangkanselanjutnya.

Kebijakan pembangunan pertanian kita didasarkan pada beberapa masalah yang belum terselesaikan oleh pemerintah seperti kemiskinan dan pengangguran yang disebabkan oleh pergeseran pembangunan dari sektor pertanian ke sektor industri. Menurut data BPS, sektor pertanian menyumbang Rp 587,191 triliun dengan harga konstan terhadap PDB tahun 2018. Sektor pertanian terus berperan dalam perekonomian nasional melalui produk domestik bruto (PDB), pendapatan valuta asing, penyediaan pangan dan produk, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Oleh karena itu, tindakan yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional antara lain meningkatkan kehidupan ekonomi melalui

pembangunan pertanian. Hal ini tepat karena Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya hidup di bidang pertanian (Hernanto, 2001).

Pembangunan pertanian sebenarnya tidak mungkin lepas dengan kondisi kehutanan Negara kita. Hal itu mengingat sebagian besar desa-desa kita berada di sekitar hutan dan banyak petani kita menghasilkan sumber daya hutan dan sumber daya alamnya. Maka pentingnya hutan ini adalah salah satu penunjang untuk mempertahankan hidup bagi masyarakat petani desa.

Petani layak mendapat perhatian utama ketika pembangunan masyarakat pedesaan dibahas, seperti dalam kelompok mayoritas. Masyarakat Indonesia diketahui masih lemah dari berbagai aspek ketidakberdayaan. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa rakyat petani indonesia masih diliputi berbagai macam dimensi ketidakberdayaan. Salah satu kesimpulan umum adalah bahwa kehidupan masyarakat terkait masalah kemiskinan struktural dan budaya. Untuk mendukung permasalahan yang mereka hadapi, perlu adanya upaya pengembangan masyarakat pedesaan yang menitikberatkan pada aspek penguatan sumber daya masyarakat pedesaan.

Melihat kenyataan di masyarakat bahwa saat ini sangat sulit bagi petani untuk mendapatkan pupuk, obat-obatan dan benih yang berkualitas, sehingga petani berusaha sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal meskipun setiap tahun Pemerintah telah mengumumkan alokasi APBN untuk sektor Pertanian semakin meningkat. Anggaran pertanian dialokasikan pada tahun 2005 sebesar Rp.12,62 triliun, pada tahun 2009 sebesar Rp.49,71 triliun, dan kemudian menjadi sebesar Rp.72,43 triliun pada tahun 2018. Dukungan untuk alokasi anggaran yang

besar tidak dapat meningkatkan produksi sektor pertanian di Indonesia, khususnya tanaman pangan di Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas.

Desa Merpati merupakan salah satu Desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Desa Merpati memiliki jumlah penduduknya sebesar 2.877 jiwa terdiri dari Laki-laki 1.412 jiwa dan Perempuan 1.465 jiwa, berdasarkan data komposisi penduduk menurut mata pencaharian, sekitar 74.7 % masyarakat Desa Merpati bermata pencaharian sebagai petani atau sekitar 1.428 jiwa. Sedangkan luas wilayah yang dijadikan untuk pusat persawahan sebesar 1.062 H2 (data monografi desa Merpati 2016).

Dari daerah inilah, sebagian besar pengembangan potensi desa diarahkan pada pengembangan pertanian untuk produksi pangan. mengingat potensi sumber daya alam di Desa Merpati memiliki prospek yang cukup baik , jika masyarakat Desa Merpati menyadari sepenuhnya bahwa sektor pertanian dapat menjadi aset yang menjanjikan untuk masa depan, Desa Merpati merupakan penghasil beras yang sangat menjanjikan. Hal Ini adalah salah satu tugas bangsa untuk mensejahterakan rakyatnya. Adanya Keputusan Menteri Pertanian No.273/KPTS/OT.160/4/20 tanggal 13 April 2007 tentang Pedoman Pembangunan Kelembagaan petani maka dalam hal ini petani diatur dan diorganisir oleh kelompok tani di setiap pemukiman dan perkumpulan.

Walau pun luas wilayah pusat persawahan sebesar 1.062 H2, namun hasil panennya tidak sebanding dengan luasnya. Menurut data monografi Desa Merpati hasil panen padi pada tahun 2018 sebesar 3,650 sampai 3,850 ton dan tahun 2019 mengalami penurunan 3,550 sampai 3,750 ton. Hal ini disebabkan karena

sebagian poktan mengalami gagal panen yang disebabkan oleh perubahan iklim yang kurang mendukung, serta meningkatnya serangan hama penyakit yang tidak terkendalikan seperti wereng, walang sangit dan kepik hijau, serta rendahnya pendidikan dan ilmu pengetahuan petani untuk menerima inovasi baru sehingga belum mampu mengelola tanaman padi dengan baik. Oleh karena itu, dengan berlakunya peraturan menteri dan dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi petani, maka dibentuklah organisasi yang bergerak di bidang pertanian yaitu Kelompok Tani untuk mendukung kesejahteraan masyarakat petani yang lebih baik.

Dunia pertanian sekarang ini memasuki babak baru dengan dikeluarkannya berbagai arahan yang sangat mendasar yang berdampak luas terhadap pembangunan pertanian. Undang-undang yang telah dibahas sejak awal 1980-an. Tentang Isu kelembagaan tetap menjadi bagian integral dari tingkat makro dan mikro di kedua bidang kebijakan. Pada tingkat makro, sebuah badan baru, Dewan Penasehat Layanan Konseling, akan muncul sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang memberikan informasi rinci tentang metode, strategi dan kebijakan layanan konseling. Namun, sebagian besar petani berpendidikan rendah merasa sulit untuk berinovasi di sektor pertanian. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Revitalisasi Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan (RPPK) 2006, pemerintah telah mencapai revitalisasi pertanian yang komprehensif. Saat mereka melatih petani dan mengubah sistem pertanian mereka menjadi lebih canggih dan menguntungkan. Dalam hal ini diperlukan alat penyuluhan pertanian aktif dengan petani dan saran para ahli.

Penyuluh pertanian sangatlah berperan penting dalam mengelola untuk meningkatkan kapasitas anggota gapoktannya. Jumlah penyuluh pertanian Kabupaten Sambas sebanyak 136 orang, yang terdiri dari 76 orang PNS dan 60 orang kontrak (THL-TBPP (Tenaga harian lepas - Tenaga bantu penyuluh pertanian)). Untuk saat ini penyuluh pertanian di Kabupaten Sambas lagi kekurangan tenaga penyuluh, termaksud penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas saat ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 orang PNS dan 4 orang kontrak, sedangkan yang mau dikelola sebanyak 8 desa, berarti disini penyuluh ada yang memegang 2 desa bahkan ada yang tiga desa. Satu orang penyuluh memegang satu desa , sedang penyuluh yang ada di Desa Merpati memegang dua desa yaitu Desa Merabuan dan Desa Merpati. Satu orang penyuluh minimal memegang 8 poktan dan maksimal 16 poktan sedangkan jumlah Gapoktan di Desa Merpati sebanyak 19 gapoktan, belum lagi gapoktan yang ada di Desa Merabuan. Hal ini sudah pasti sedikit kurangnya dapat menghambat proses pengelolaan pemberdayaan pada Gapoktan khususnya di Desa Merpati.

Arahan RPPK adalah mewujudkan pertanian tangguh dalam rangka memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk itu perlu didukung sumber daya manusia yang berkualitas melalui sosialisasi pertanian melalui pendekatan kelompok yang dapat mendukung sistem agribisnis pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan). Sehubungan dengan hal itu perlu dilakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kelompok tani

menjadi kelompok yang kuat dan mandiri untuk meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya. Pembinaan kelompok tani diharapkan mampu menggali potensi yang ada untuk lebih efektif mengatasi permasalahan agribisnis anggotanya dan mempermudah akses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan sumber diatas dapat diuraikan bahwa sesungguhnya Gabungan Kelompok Tani di Desa Merpati sudah terbentuk pada tahun 2007-2018 yang terdiri dari 20 kelompok seperti tabel di bawah ini.

Table 1.1
Data Kelompok Tani Di Desa Merpati Kecamatan Tangaran tahun 2018-2021

No	Desa	Nama Gapoktan	Alamat sekretariat	Tahun di Bentuk	Total Anggota	Jumlah/ Vol Luas (Ha)
1	Merpati	Sinar Baru	Dsn.Pauh	2006	20	20
2		Keluarga Sejahtera	Dsn.Lubuk Rawa	2006	25	25
3		Semangat Baru	Dsn.Pauh	2007	20	20
4		Mentari	Dsn.Lubuk Rawa	2007	20	20
5		Indah	Dsn.Pauh	2007	20	20
6		Gemar Tani	Dsn.Lubuk Rawa	2008	20	20
7		Mekar Sari	Dsn.Lubuk Rawa	2010	20	20
8		Harapan Bersama	Dsn.Lubuk Rawa	2013	20	20
9		Pelangi	Dsn.Pauh	2009	20	20
10		Cipta Usaha Mandiri	Dsn.Pauh	2012	25	25
11		Harapan Selumar	Dsn.Pauh	2012	20	20
12		Cemerlang	Dsn.Pauh	2012	25	25
13		Belauk Jaya	Dsn.Pauh	2010	20	20
14		Nurhidayah	Dsn.Lubuk Rawa	2013	20	20
15		Dewi Sri Menanti	Dsn.Pauh	2012	20	20
16		Perikesit	Dsn.Pauh	2012	25	25
17		Damal	Dsn.Lubuk Rawa	2013	20	20
18		Sempurna	Dsn.Pauh	2013	20	20

19		Harapan Baru	Dsn.Lubuk Rawa	2013	20	20
20		Aisgro	Dsn.pauh	2018	21	21

Sumber dari :*Balai Penyuluhan Kecamatan Tangaran 2018-2021*

Berdasarkan tabel 1.1 mengidentifikasi bahwa menurut informasi dari ketuaKelompok Tani Ia mengatakan bahwa poktan di Desa Merpati masih belum berkembang, karena disebabkan seringnya mengalami gagal panen padi sehingga mengakibatkan trauma yang mendalam pada petani, hal inilah yang mengakibatkan petani tidak aktif dalam kelompok tani, hanya sepuluh kelompok yang aktif, seperti kelompok Semangat Baru, Belauk Jaya, Cipta Usaha Mandiri, Harapan Selumar, Indah, Mekar Sari, Nurhidayah, Perikesit, Damai dan Aisgro.

Kelompok Tani di Desa Merpati memiliki beberapa permasalahan yang belum dapat diatasi seperti lemahnya aksesibilitas petani terhadap lembaga sarana produksi pertanian, terlambatnya bantuan dari pemerintah seperti obat, pupuk, jenis bibit padi unggul, rendahnya pengetahuan dan tingkat pendidikan petani, sikap mental masyarakat yang belum menyadari sepenuhnya bahwa lahan pertanian dapat dijadikan sebagai mata pencaharian utama,

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani di Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas masih belum efektif. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah terutama lembaga-lembaga yang bergabung kedalam tim koordinasi kebijakan pertanian, karena keberhasilan suatu program atau kebijakan sangat dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusia itu sendiri. Selain itu peran utama Kelompok Tani adalah *Pertama*, Kelompok Tani berfungsi sebagai badan sentral dari sistem yang

dikembangkan. *Kedua*, Kelompok Tani dibebankan untuk peningkatan kebutuhan pangan tingkat lokal. *Ketiga*, Pada tahun 2007, Kelompok Tani dianggap sebagai organisasi pengelola ekonomi pedesaan (OPEP) yang menerima dana untuk menambah modal, yaitu pinjaman untuk membeli gabah dari petani pada saat musim panen agar harga gabah tidak turun terlalu banyak.

Kecamatan Tangaran mempunyai potensi besar pada aspek pembangunan pertanian. Khususnya pada usaha tani padi-padian dan hortikultura di pedesaan.

Oleh karena untuk mencapai suatu Keberhasilan yang maksimal dari pelaksanaan program usaha tani sangat ditentukan kinerja para penyuluh pertanian. Tahun 2019, Kabupaten Sambas ditargetkan untuk luas pada Palawija mencapai 123.743 hektar, luas tanam jeruk 8.700 hektar. Target produksi 388.443 ton hasil produksi dan jeruk 111.273 ton.

Demikian dalam hal ini pertanian yang sering menjadi acuannya adalah pola pikir masyarakat dalam penerapan program kelompok tani untuk guna meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam meningkatkan perekonomian yang dapat mengacu kepada kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu penerapan sistem kelompok tani ini menjadi kunci para petani untuk menjadi sarana bagi masyarakat sekitarnya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti masalah yang berjudul “Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Usaha Tani padi-padian di Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas”.

1.2. Indentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya dalam beberapa poin. Masalah yang diidentifikasi pada penelitian ini adalah:

1. Hasil produksi pertanian di Desa Merpati mengalami penurunan
2. Kurangnya peran pemerintah dalam proses pengawasan kelompok tani di Dusun Pauh Desa Merpati.
3. Kurangnya akses terhadap teknologi yang memfasilitasi para kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan usaha tani Padi-padian di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran.

1.3. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis menentukan fokus penelitiannya hanya pada “Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Usaha Tani Padi-Padian Guna Meningkatkan Hasil Produksi Padi di Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas”.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka di buat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pemberdayaan kelompok tani melalui usaha tani Padi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas ?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendiskripsikan bentuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelompok tani dalam upaya meningkatkan hasil produksi melalui usaha tani Padi di Desa Merpati Kecamatan Tangaran.
2. Mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan kelompok tani pada usaha tani padi di Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah di bidang Pendidikan Luar bangku kuliah pada konsep pemberdayaan anggota kelompok tani di masyarakat perlu diterapkan di lingkungan masyarakat itu sendiri.
2. Sebagai pengembangan Ilmu Pembangunan Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Tanjungpura.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan penelitian untuk penelitian selanjutnya, dan sebagai penambah pengalaman dan pengetahuan khususnya bagi peneliti, umumnya bagi masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat petani dalam usaha tani padi-padian melalui kelompok tani.
2. Bagi peneliti lain, sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Petani, sebagai bahan pembelajaran untuk menentukan tindakan pelestarian lingkungan dan meningkatkan produktivitas keluarga petani untuk menjamin ketahanan pangan bagi keluarga petani pedesaan.